

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Cara Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara. Pengawas Pelayanan Publik	22
B. Pelayanan Publik	28
C. Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik	32

BAB III	LANDASAN TEORI	43
	A. Teori Negara Hukum	43
	B. Teori Kewenangan.....	52
	C. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara dan Lembaga Negara .	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
	A. Dasar Pertimbangan Pemberian Kewenangan Ajudikasi Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Kepada Ombudsman Republik Indonesia.....	68
	B. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Perspektif Kelembagaan, Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman.....	93
	1. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Perspektif Kelembagaan.	93
	2. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Perspektif Keuangan Negara.....	126
	3. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman.	141
	C. Kewenangan Ajudikasi Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Di Masa Yang Akan Datang	200
BAB V	PENUTUP	236
	A. Kesimpulan	236
	B. Saran	238
	DAFTAR PUSTAKA	240